ASESMEN SUMATIF AKHIR SEMESTER (ASAS) GANJIL
SMP ……
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

NASKAH SOAL

Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila	**Nama**	:
Kelas/Semester	: VIII (Delapan)/Ganjil	**No. Absen**	:
Hari/Tanggal	:	**Waktu**	: 120 menit

Petunjuk Umum

1.Berdoalah sebelum mengerjakan soal.
2.Tulislah nama dan nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia.
3.Bacalah setiap soal dengan teliti sebelum menjawab.
4.Untuk soal pilihan ganda, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D.
5.Untuk soal uraian, jawablah dengan jelas, runtut, dan disertai alasan.
6.Periksalah kembali jawabanmu sebelum diserahkan kepada pengawas.

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1.Warga Desa Sukamaju yang terdiri atas pemeluk agama dan suku yang berbeda bergotong royong membangun jembatan desa yang rusak akibat banjir. Peristiwa tersebut menunjukkan fungsi Pancasila sebagai ….

A.sumber tertib hukum
B.ideologi tertutup
C.perjanjian antarnegara
D.pemersatu bangsa

2.Dalam pembahasan sebuah rancangan undang-undang, DPR dan pemerintah sepakat menghapus pasal yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai ….

A.sumber dari segala sumber hukum
B.pandangan hidup pribadi semata
C.hasil perjanjian dengan negara lain
D.pedoman teknis penyusunan anggaran

3.Pemerintah menerbitkan undang-undang tentang perlindungan anak sebagai penjabaran nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Undang-undang tersebut termasuk dalam kategori ….

A.nilai instrumental
B.nilai dasar
C.nilai praksis
D.nilai historis

4.Perhatikan pernyataan berikut!

"Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti rumusan sila-silanya boleh diubah sesuai perkembangan zaman."

Penilaian yang tepat terhadap pernyataan tersebut adalah ….

A.tepat, karena ideologi terbuka harus mengikuti perkembangan zaman
B.tepat, karena Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama
C.tidak tepat, karena Pancasila tidak boleh ditafsirkan sama sekali
D.tidak tepat, sila-silanya bersifat tetap

5.Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) secara massal serta penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi merupakan ciri penerapan Pancasila pada masa ….

A.Orde Baru
B.Orde Lama
C.Reformasi
D.Demokrasi Liberal

6.Pada masa Orde Lama, MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Penilaian yang paling tepat terhadap kebijakan tersebut adalah ….

A.sesuai, karena presiden merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia
B.menyimpang, karena bertentangan dengan nilai ketuhanan dan keagamaan
C.menyimpang, karena meniadakan pembatasan kekuasaan
D.sesuai, karena keputusan itu ditetapkan oleh lembaga negara yang sah

7.Sejumlah akun media sosial menyebarkan konten provokatif yang mengadu domba antarsuku sehingga memicu ketegangan di beberapa daerah. Nilai Pancasila yang paling terancam oleh fenomena tersebut adalah ….

A.Persatuan Indonesia
B.Ketuhanan Yang Maha Esa
C.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
D.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

8.Kelas VIII-B harus memilih tujuan karyawisata. Murid terbagi menjadi dua kelompok dengan pendapat berbeda. Cara pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah ….

A.bermusyawarah untuk mufakat terlebih dahulu
B.langsung memungut suara tanpa mendengarkan alasan setiap kelompok
C.menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada ketua kelas tanpa diskusi
D.mengikuti pendapat kelompok yang anggotanya paling banyak bicara

9.Pak Arif, seorang pegawai kelurahan, menolak uang pelicin dari warga karena ia meyakini kejujuran dan keadilan sebagai pegangan hidupnya. Sikap Pak Arif menunjukkan penerapan Pancasila sebagai ….

A.dasar negara Indonesia
B.pandangan hidup bangsa
C.sumber hukum nasional
D.perjanjian luhur bangsa

10. Doni menemukan unggahan di grup percakapan yang mengajak anggotanya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Sikap yang paling tepat dilakukan Doni adalah ….

A. menyebarkannya agar orang lain juga mengetahuinya
B. menolak dan melaporkannya
C. mendiamkannya karena bukan urusan pribadinya
D. membalas dengan kata-kata kasar di kolom komentar

11. OSIS menerima dana sumbangan untuk membantu murid yang mengalami kesulitan membeli perlengkapan sekolah. Tindakan OSIS yang paling mencerminkan sila kelima Pancasila adalah ….

A. membagikan bantuan hanya kepada pengurus OSIS
B. membagikan bantuan kepada murid yang berprestasi
C. membagikan bantuan sesuai kebutuhan setiap murid
D. menyimpan seluruh dana untuk kegiatan tahun depan

12. Sekolah ingin menguatkan nilai-nilai Pancasila di kalangan murid yang aktif bermedia sosial. Rancangan program yang paling tepat adalah ….

A. larangan membawa ponsel ke sekolah tanpa pengecualian
B. lomba jumlah pengikut media sosial terbanyak antarkelas
C. pemasangan foto Garuda Pancasila di setiap sudut kelas
D. kampanye konten toleransi dan antihoaks

13. Dua kelompok suporter futsal dari dua kelas sering saling mengejek hingga hampir terjadi perkelahian. Rancangan solusi yang paling sesuai dengan nilai Pancasila adalah ….

A. melarang seluruh pertandingan futsal antarkelas selamanya
B. memberikan hukuman fisik kepada semua anggota suporter
C. membiarkan masalah selesai sendiri seiring waktu berjalan
D. dialog bersama guru dan laga persahabatan

14. Pada awal semester, kelas VIII-A akan membuat kesepakatan kelas. Rancangan cara penyusunan yang paling mencerminkan sila keempat Pancasila adalah ….

A. disusun bersama seluruh murid melalui musyawarah
B. dibuat sendiri oleh ketua kelas lalu diumumkan
C. disalin dari kesepakatan kelas lain tanpa diskusi
D. ditentukan oleh murid yang nilainya paling tinggi

15. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Peristiwa tersebut menunjukkan sikap para pendiri bangsa, yaitu ….

A. mengutamakan kepentingan golongan mayoritas
B. menolak peran agama dalam kehidupan bernegara
C. mengikuti tekanan dari pemerintah pendudukan
D. mengutamakan persatuan bangsa

16. Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda untuk bergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ….

A. pertama
B. keempat
C. kedua
D. ketiga

17. Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan. Sikap tersebut paling sesuai dengan isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ….

A.kedua
B.ketiga
C.pertama
D.keempat

18. Perhatikan pernyataan berikut!

"Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat diubah melalui amendemen seperti halnya pasal-pasalnya."

Penilaian yang tepat terhadap pernyataan tersebut adalah ….

A.tidak tepat, karena memuat dasar negara
B.tepat, karena MPR berwenang mengubah seluruh isi UUD
C.tepat, karena Pembukaan telah diubah pada amendemen pertama
D.tidak tepat, karena Pembukaan bukan bagian dari UUD 1945

19. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945. Penyebab utama dikeluarkannya dekrit tersebut adalah ….

A.terbentuknya negara federal Republik Indonesia Serikat
B.Konstituante gagal menyusun UUD baru
C.terjadinya pemberontakan Gerakan 30 September
D.MPR melaksanakan amendemen pertama UUD 1945

20. Perhatikan pernyataan berikut!

"Setelah amendemen UUD 1945, presiden dapat terus menjabat tanpa batas selama dipilih kembali oleh rakyat."

Penilaian yang tepat terhadap pernyataan tersebut adalah ….

A.tepat, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat
B.tidak tepat, presiden paling lama menjabat dua periode
C.tidak tepat, presiden hanya boleh menjabat satu periode
D.tepat, karena masa jabatan diatur oleh undang-undang

21. Sekelompok warga mengajukan pengujian sebuah undang-undang ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Peristiwa ini menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai ….

A.peraturan pelaksana bagi undang-undang
B.pedoman yang tidak mengikat secara hukum
C.keputusan yang dibuat oleh presiden saja
D.tolok ukur bagi peraturan di bawahnya

22. Para petani menyampaikan aspirasi secara damai di depan gedung DPRD terkait harga pupuk. Kegiatan tersebut dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 ….

A.Pasal 27 ayat (3)
B.Pasal 29 ayat (2)
C.Pasal 28E ayat (3)
D.Pasal 31 ayat (1)

23. Sebuah sekolah mewajibkan seluruh murid mengikuti kegiatan ibadah agama tertentu, termasuk murid yang memeluk agama lain. Penilaian yang tepat terhadap kebijakan tersebut adalah ….

A.tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (2)
B.sesuai, karena bertujuan meningkatkan keimanan murid
C.sesuai, karena sekolah berwenang membuat aturan sendiri
D.tidak sesuai, karena kegiatan agama dilarang di sekolah

24. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Perilaku pelajar yang paling tepat mencerminkan bela negara pada masa damai adalah ….

A.ikut tawuran untuk membela nama baik sekolah
B.menghindari upacara bendera karena cuaca panas
C.belajar tekun dan cinta produk lokal
D.membalas ejekan warganet negara lain dengan hinaan

25. Sebelum amendemen, presiden dipilih oleh MPR. Setelah amendemen, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ….

A.MPR menjadi lembaga tertinggi negara
B.kekuasaan presiden menjadi tidak terbatas
C.peran rakyat dalam pemilu semakin berkurang
D.kedaulatan rakyat makin langsung

26.OSIS akan memperingati Hari Konstitusi pada 18 Agustus. Rancangan kegiatan yang paling bermakna untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi adalah ….

A.lomba menghias kelas dengan warna merah putih
B.pentas musik bebas tanpa tema kegiatan tertentu
C.pembagian hadiah untuk murid yang hadir paling awal
D.debat dan kuis tentang isi UUD serta penerapannya

27. Muncul perbedaan pendapat di masyarakat tentang wacana amendemen kelima UUD NRI Tahun 1945. Rancangan sikap yang paling konstitusional bagi warga negara adalah ….

A.melakukan unjuk rasa yang merusak fasilitas umum
B.menyebarkan informasi bohong untuk menggiring opini
C.menyalurkan aspirasi lewat wakil rakyat
D.memaksa anggota MPR mengikuti pendapat kelompoknya

28. Perhatikan jenis peraturan berikut!

(1) Peraturan Pemerintah
(2) Ketetapan MPR
(3) Peraturan Daerah Provinsi
(4) Undang-Undang/Perppu
(5) Peraturan Presiden

Urutan hierarki peraturan tersebut dari yang tertinggi adalah ….

A.(2), (4), (1), (5), (3)
B.(4), (2), (1), (5), (3)
C.(2), (4), (5), (1), (3)
D.(2), (1), (4), (3), (5)

29. Sebuah peraturan daerah kabupaten ternyata memuat ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang. Akibat hukum yang tepat terhadap peraturan daerah tersebut adalah ….

A.tetap berlaku karena dibuat oleh pemerintah daerah yang sah
B.harus diikuti karena peraturan daerah lebih dekat dengan warga
C.dapat dibatalkan karena melanggar hierarki
D.menggantikan undang-undang yang berlaku di daerah tersebut

30. Sekelompok masyarakat menilai sebuah peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang. Lembaga yang berwenang menguji peraturan pemerintah tersebut adalah ….

A.Mahkamah Konstitusi
B.Mahkamah Agung
C.Komisi Yudisial
D.Dewan Perwakilan Rakyat

31. Perhatikan pernyataan berikut!

"Presiden dapat menetapkan Perppu kapan saja dan Perppu tersebut berlaku selamanya tanpa persetujuan DPR."

Penilaian yang tepat terhadap pernyataan tersebut adalah ….

A.tepat, karena presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi
B.tidak tepat, karena Perppu hanya dapat ditetapkan oleh DPR
C.tidak tepat, Perppu perlu persetujuan DPR
D.tepat, karena kedudukan Perppu setara dengan undang-undang

32. Sebuah RUU telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, tetapi dalam waktu 30 hari sejak disetujui belum disahkan oleh Presiden. Status RUU tersebut adalah ….

A.batal dan harus dibahas ulang dari awal oleh DPR
B.sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan
C.ditunda sampai Presiden bersedia menandatanganinya
D.diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan

33. Pemerintah Kabupaten Indramayu berencana membuat aturan yang membatasi penggunaan kantong plastik di pasar tradisional dalam bentuk peraturan daerah. Pihak yang berwenang membentuk peraturan tersebut adalah ….

A.DPR bersama Presiden
B.DPRD kabupaten bersama bupati
C.gubernur bersama DPRD provinsi
D.camat bersama para kuwu

34.DPRD sedang membahas rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Bentuk partisipasi masyarakat yang paling tepat adalah ….

A.menolak semua isi rancangan tanpa alasan
B.menyebarkan isu bohong tentang rancangan
C.memberi masukan melalui konsultasi publik
D.menunggu peraturan disahkan tanpa peduli

35. Raka tidak memakai helm saat membonceng kakaknya ke warung dengan alasan jaraknya dekat dan tidak ada polisi. Penilaian yang tepat terhadap alasan Raka adalah ….

A.tepat, karena aturan hanya berlaku di jalan raya besar
B.tidak tepat, aturan dipatuhi demi keselamatan di mana pun
C.tepat, karena tidak ada petugas yang melakukan pemeriksaan
D.tidak tepat, karena Raka pasti akan ditilang oleh polisi

36. Setelah sebuah undang-undang tentang pendidikan disahkan, Presiden menetapkan aturan yang lebih rinci untuk menjalankan undang-undang tersebut sebagaimana mestinya. Aturan tersebut berbentuk ….

A. Peraturan Pemerintah
B. Ketetapan MPR
C. Peraturan Daerah Provinsi
D. Keputusan Menteri

37. Meskipun ada peraturan daerah yang melarang membuang sampah ke sungai, banyak warga tetap melakukannya. Penilaian yang paling tepat tentang dampak perilaku tersebut adalah ….

A. hanya merugikan pelaku karena mendapat sanksi denda
B. tidak berdampak karena sungai akan membersihkan diri
C. menguntungkan warga karena tidak perlu membayar iuran
D. merugikan banyak orang karena banjir

38. Pengurus kelas diminta menyusun tata tertib kelas yang baru. Rancangan tata tertib yang paling tepat adalah tata tertib yang ….

A. dibuat sangat banyak agar semua hal dapat diatur
B. disusun bersama dan sejalan aturan sekolah
C. memuat sanksi berat agar murid takut melanggar
D. boleh berbeda dari tata tertib sekolah yang berlaku

39. Para pemuda desa ingin mengusulkan aturan tentang pembatasan truk bertonase besar yang merusak jalan desa. Rancangan langkah yang paling tepat adalah ….

A. memblokade jalan desa hingga pemerintah membuat aturan baru
B. membuat aturan sendiri lalu menilang truk yang melintas
C. mengunggah keluhan di media sosial tanpa usulan apa pun
D. mengkaji masalah lalu mengusulkannya ke DPRD

40. Banyak murid yang mengendarai sepeda motor ke sekolah padahal belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Rancangan program sekolah yang paling tepat untuk mengatasinya adalah ….

A. menyediakan lahan parkir motor yang lebih luas
B. membiarkan karena jarak rumah murid cukup jauh
C. sosialisasi bersama polisi dan orang tua
D. menyita motor murid tanpa pemberitahuan apa pun

B. URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan tepat!

41. Sekelompok warga menolak pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungannya, padahal panitia telah memenuhi persyaratan perizinan. Evaluasilah sikap warga tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kemudian berikan dua solusi yang tepat!

42. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat empat tujuan negara. Analisislah keempat tujuan tersebut, lalu kaitkan masing-masing dengan satu contoh program atau kebijakan pemerintah!

43. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan serta pertahanan dan keamanan negara. Rancanglah tiga rencana aksi bela negara yang dapat kamu lakukan sebagai pelajar di lingkungan sekolah dan masyarakat! Sertakan tujuan dari setiap aksi.

44. Sebuah kabupaten menerbitkan peraturan daerah yang mewajibkan pedagang kaki lima membayar retribusi sangat tinggi, padahal undang-undang di atasnya mengatur perlindungan usaha kecil. Evaluasilah peraturan daerah tersebut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, lalu jelaskan langkah hukum yang dapat ditempuh para pedagang!

45. Penggunaan ponsel di sekolahmu sering mengganggu kegiatan belajar. Rancanglah usulan peraturan sekolah tentang penggunaan ponsel yang memuat: (a) tujuan peraturan, (b) minimal tiga ketentuan pokok, (c) sanksi yang mendidik, dan (d) cara penyusunan yang melibatkan warga sekolah!

— Selamat Mengerjakan —

ASESMEN SUMATIF AKHIR SEMESTER (ASAS) GANJIL

SMP .....

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

KISI-KISI SOAL

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila

Kelas/Semester/Fase : VIII/Ganjil/D

Kurikulum : Kurikulum Merdeka – Pembelajaran Mendalam

Jumlah dan Bentuk Soal : 45 soal (40 pilihan ganda dan 5 uraian)

Alokasi Waktu : 120 menit

No.	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Materi Ajar	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
Bab 1 Pancasila dalam Kehidupan Bangsaku (Elemen: Pancasila)							
1	Murid mampu menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi terbuka, penerapannya dari masa ke masa, serta tantangan dan upaya menjaganya dalam kehidupan berbangsa.	1.1 Menganalisis kedudukan, fungsi, dan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai peristiwa kehidupan.	Fungsi Pancasila	Disajikan kasus gotong royong warga yang berbeda latar belakang, murid dapat menganalisis fungsi Pancasila yang tampak.	C4	PG	**1**
2			Pancasila sebagai dasar negara	Disajikan kasus pembahasan rancangan undang-undang, murid dapat menganalisis kedudukan Pancasila.	C4	PG	**2**
3			Pancasila sebagai ideologi terbuka	Disajikan contoh kebijakan pemerintah, murid dapat menganalisis jenis nilai dalam ideologi terbuka.	C4	PG	**3**
4		1.2 Mengevaluasi penerapan Pancasila dari masa ke masa serta sikap menghadapi tantangannya.	Pancasila sebagai ideologi terbuka	Disajikan pernyataan tentang ideologi terbuka, murid dapat menilai ketepatannya.	C5	PG	**4**
5			Penerapan Pancasila dari masa ke masa	Disajikan ciri penerapan Pancasila, murid dapat menganalisis masa pemerintahan yang dimaksud.	C4	PG	**5**

No.	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Materi Ajar	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
6			Penerapan Pancasila dari masa ke masa	Disajikan peristiwa pada masa Orde Lama, murid dapat menilai alasan peristiwa tersebut menyimpang dari Pancasila.	C5	PG	**6**
7		1.1 Menganalisis kedudukan, fungsi, dan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai peristiwa kehidupan.	Tantangan penerapan Pancasila	Disajikan fenomena di media sosial, murid dapat menganalisis nilai Pancasila yang paling terancam.	C4	PG	**7**
8		1.2 Mengevaluasi penerapan Pancasila dari masa ke masa serta sikap menghadapi tantangannya.	Pengamalan sila keempat	Disajikan situasi pengambilan keputusan di kelas, murid dapat menentukan cara yang paling sesuai dengan sila keempat.	C5	PG	**8**
9		1.1 Menganalisis kedudukan, fungsi, dan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai peristiwa kehidupan.	Pancasila sebagai pandangan hidup	Disajikan kasus perilaku jujur seseorang, murid dapat menganalisis kedudukan Pancasila yang tampak.	C4	PG	**9**
10		1.2 Mengevaluasi penerapan Pancasila dari masa ke masa serta sikap menghadapi tantangannya.	Tantangan ideologi	Disajikan ajakan mengganti Pancasila di media sosial, murid dapat menentukan sikap yang paling tepat.	C5	PG	**10**
11		1.1 Menganalisis kedudukan, fungsi, dan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai peristiwa kehidupan.	Pengamalan sila kelima	Disajikan kegiatan OSIS, murid dapat menganalisis tindakan yang paling mencerminkan sila kelima.	C4	PG	**11**
12		1.3 Merancang upaya nyata menguatkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan masyarakat.	Menguatkan Pancasila di era digital	Murid dapat merancang program sekolah untuk menguatkan nilai Pancasila di era digital.	C6	PG	**12**

No.	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Materi Ajar	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
13			Menguatkan persatuan	Disajikan konflik antarkelompok murid, murid dapat merancang solusi yang sesuai nilai Pancasila.	C6	PG	**13**
14			Pengamalan sila keempat	Murid dapat merancang cara penyusunan kesepakatan kelas yang mencerminkan sila keempat.	C6	PG	**14**
15		1.2 Mengevaluasi penerapan Pancasila dari masa ke masa serta sikap menghadapi tantangannya.	Tantangan penerapan Pancasila	Disajikan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah, murid dapat mengevaluasi kasus tersebut berdasarkan nilai Pancasila dan memberikan solusi.	C5	Uraian	**41**
Bab 2 Pedoman Negaraku (Elemen: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)							
16	Murid mampu menganalisis sejarah perumusan, kedudukan, isi, dinamika pemberlakuan, dan amendemen UUD NRI Tahun 1945, serta menerapkan ketentuannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	2.1 Menganalisis sejarah, kedudukan, isi Pembukaan, dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 dalam berbagai peristiwa.	Sejarah perumusan UUD NRI Tahun 1945	Disajikan peristiwa perubahan rumusan sila pertama, murid dapat menganalisis nilai yang terkandung di dalamnya.	C4	PG	**15**
17			Isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Disajikan peristiwa pengiriman pasukan perdamaian, murid dapat menganalisis alinea Pembukaan yang mendasarinya.	C4	PG	**16**
18			Isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Disajikan sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, murid dapat menganalisis alinea Pembukaan yang mendasarinya.	C4	PG	**17**
19		2.2 Mengevaluasi pernyataan dan perilaku berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan hasil amendemennya.	Kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Disajikan pernyataan tentang perubahan Pembukaan UUD, murid dapat menilai ketepatannya.	C5	PG	**18**

No.	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Materi Ajar	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
20		2.1 Menganalisis sejarah, kedudukan, isi Pembukaan, dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 dalam berbagai peristiwa.	Dinamika pemberlakuan konstitusi	Murid dapat menganalisis penyebab dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.	C4	PG	**19**
21		2.2 Mengevaluasi pernyataan dan perilaku berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan hasil amendemennya.	Amendemen UUD NRI Tahun 1945	Disajikan pernyataan tentang masa jabatan presiden, murid dapat menilai ketepatannya berdasarkan hasil amendemen.	C5	PG	**20**
22		2.1 Menganalisis sejarah, kedudukan, isi Pembukaan, dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 dalam berbagai peristiwa.	Kedudukan UUD NRI Tahun 1945	Disajikan kasus pengujian undang-undang, murid dapat menganalisis kedudukan UUD NRI Tahun 1945.	C4	PG	**21**
23			Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945	Disajikan kegiatan menyampaikan aspirasi, murid dapat menganalisis pasal UUD yang menjaminnya.	C4	PG	**22**
24		2.2 Mengevaluasi pernyataan dan perilaku berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan hasil amendemennya.	Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945	Disajikan kebijakan sekolah, murid dapat menilai kesesuaiannya dengan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945.	C5	PG	**23**
25			Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945	Murid dapat menilai perilaku pelajar yang paling mencerminkan bela negara sesuai Pasal 27 ayat (3).	C5	PG	**24**
26		2.1 Menganalisis sejarah, kedudukan, isi Pembukaan, dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 dalam berbagai peristiwa.	Amendemen UUD NRI Tahun 1945	Disajikan perubahan cara pemilihan presiden, murid dapat menganalisis makna perubahan tersebut.	C4	PG	**25**

No.	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Materi Ajar	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
27		2.3 Merancang kegiatan dan sikap konstitusional dalam kehidupan sehari-hari.	Penerapan UUD NRI Tahun 1945	Murid dapat merancang kegiatan peringatan Hari Konstitusi yang bermakna di sekolah.	C6	PG	**26**
28			Sikap konstitusional	Disajikan perbedaan pendapat tentang usulan amendemen, murid dapat merancang sikap yang konstitusional.	C6	PG	**27**
29		2.1 Menganalisis sejarah, kedudukan, isi Pembukaan, dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 dalam berbagai peristiwa.	Isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Murid dapat menganalisis tujuan negara dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan mengaitkannya dengan program pemerintah.	C4	Uraian	**42**
30		2.3 Merancang kegiatan dan sikap konstitusional dalam kehidupan sehari-hari.	Penerapan pasal bela negara	Murid dapat merancang rencana aksi bela negara sesuai Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.	C6	Uraian	**43**
Bab 3 Peraturan di Negaraku (Elemen: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)							
31	Murid mampu menganalisis jenis, hierarki, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mengevaluasi kepatuhan terhadapnya, serta berpartisipasi dalam penyusunan dan penegakan peraturan di lingkungannya.	3.1 Menganalisis jenis, hierarki, kewenangan pembentukan, dan pengujian peraturan perundang-undangan.	Hierarki peraturan perundang-undangan	Disajikan jenis-jenis peraturan, murid dapat menganalisis urutan hierarki yang benar.	C4	PG	**28**
32			Asas hierarki peraturan	Disajikan kasus peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang, murid dapat menganalisis akibat hukumnya.	C4	PG	**29**
33			Pengujian peraturan perundang-undangan	Disajikan kasus peraturan pemerintah yang diduga bertentangan dengan undang-undang, murid dapat menganalisis lembaga yang berwenang mengujinya.	C4	PG	**30**
34		3.2 Mengevaluasi kepatuhan dan partisipasi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Disajikan pernyataan tentang Perppu, murid dapat menilai ketepatannya.	C5	PG	**31**

No.	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Materi Ajar	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
35		3.1 Menganalisis jenis, hierarki, kewenangan pembentukan, dan pengujian peraturan perundang-undangan.	Proses pembentukan undang-undang	Disajikan kasus RUU yang tidak disahkan presiden, murid dapat menganalisis status hukumnya.	C4	PG	**32**
36			Pembentukan peraturan daerah	Disajikan rencana pengaturan di tingkat kabupaten, murid dapat menganalisis pihak yang berwenang membentuk peraturannya.	C4	PG	**33**
37		3.2 Mengevaluasi kepatuhan dan partisipasi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.	Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan	Murid dapat menilai bentuk partisipasi masyarakat yang paling tepat dalam pembentukan peraturan daerah.	C5	PG	**34**
38			Kepatuhan terhadap peraturan	Disajikan alasan seseorang melanggar aturan lalu lintas, murid dapat menilai alasan tersebut.	C5	PG	**35**
39		3.1 Menganalisis jenis, hierarki, kewenangan pembentukan, dan pengujian peraturan perundang-undangan.	Jenis peraturan perundang-undangan	Disajikan kasus aturan pelaksana undang-undang, murid dapat menganalisis jenis peraturan tersebut.	C4	PG	**36**
40		3.2 Mengevaluasi kepatuhan dan partisipasi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.	Dampak pelanggaran peraturan	Disajikan kasus pelanggaran peraturan daerah, murid dapat menilai dampak yang paling luas.	C5	PG	**37**
41		3.3 Merancang aturan dan kegiatan yang menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan sekitar.	Menyusun tata tertib	Murid dapat merancang ciri tata tertib kelas yang baik.	C6	PG	**38**
42			Partisipasi dalam pembentukan peraturan	Murid dapat merancang langkah menyampaikan usulan peraturan kepada pemerintah daerah.	C6	PG	**39**

No.	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Materi Ajar	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
43			Menumbuhkan kesadaran hukum	Murid dapat merancang kampanye kesadaran hukum lalu lintas yang efektif di sekolah.	C6	PG	**40**
44		3.1 Menganalisis jenis, hierarki, kewenangan pembentukan, dan pengujian peraturan perundang-undangan.	Hierarki dan pengujian peraturan	Disajikan kasus peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang, murid dapat mengevaluasi kasus tersebut dan menentukan langkah hukum yang tepat.	C5	Uraian	**44**
45		3.3 Merancang aturan dan kegiatan yang menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan sekitar.	Merancang peraturan sekolah	Murid dapat merancang usulan peraturan sekolah yang partisipatif dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.	C6	Uraian	**45**

Rekapitulasi Sebaran Level Kognitif

Level Kognitif	Pilihan Ganda	Uraian	Jumlah
C4 (Menganalisis)	20	1	**21**
C5 (Mengevaluasi)	12	2	**14**
C6 (Mencipta)	8	2	**10**
Jumlah	**40**	**5**	**45**

ASESMEN SUMATIF AKHIR SEMESTER (ASAS) GANJIL
SMP .....
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN

A. KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA

Ringkasan Kunci

1. D	2. A	3. A	4. D	5. A	6. C	7. A	8. A	9. B	10. B
11. C	12. D	13. D	14. A	15. D	16. B	17. C	18. A	19. B	20. B
21. D	22. C	23. A	24. C	25. D	26. D	27. C	28. A	29. C	30. B
31. C	32. B	33. B	34. C	35. B	36. A	37. D	38. B	39. D	40. C

Pembahasan

No.	Kunci	Pembahasan Singkat
1	D	Perbedaan agama dan suku tidak menghalangi kerja sama warga; hal ini menunjukkan Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa.
2	A	Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 2), sehingga setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengannya.
3	A	Nilai instrumental adalah penjabaran nilai dasar Pancasila dalam bentuk kebijakan, program, dan peraturan perundang-undangan.
4	D	Sebagai ideologi terbuka, nilai dasar Pancasila tetap, sedangkan penjabarannya (nilai instrumental dan praksis) dapat menyesuaikan perkembangan zaman.
5	A	Pada masa Orde Baru, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 (Tap MPR No. II/MPR/1978) dan menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal.
6	C	Jabatan seumur hidup meniadakan pergantian kepemimpinan secara demokratis dan menghilangkan pembatasan kekuasaan, sehingga bertentangan dengan sila keempat.
7	A	Provokasi antarsuku berpotensi memecah belah bangsa, sehingga nilai yang paling terancam adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia.
8	A	Sila keempat mengutamakan musyawarah untuk mufakat; pemungutan suara dilakukan apabila mufakat tidak tercapai.
9	B	Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi petunjuk dan pegangan dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari.
10	B	Ajakan mengganti Pancasila merupakan ancaman ideologi; sikap yang tepat adalah menolak, tidak menyebarkan, dan melaporkannya kepada pihak berwenang.
11	C	Keadilan sosial berarti memberikan bantuan secara adil sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan kedekatan atau prestasi semata.
12	D	Program yang melibatkan murid membuat konten positif dan melawan hoaks memanfaatkan media digital untuk menguatkan nilai Pancasila secara nyata.
13	D	Dialog dan kegiatan bersama membangun saling pengertian serta mempererat persatuan, sesuai nilai sila ketiga dan keempat.

No.	Kunci	Pembahasan Singkat
14	**A**	Sila keempat menekankan musyawarah dan keterlibatan semua anggota dalam mengambil keputusan bersama.
15	**D**	Perubahan tersebut dilakukan demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia yang beragam, menunjukkan sikap rela berkorban dan mengutamakan kepentingan bangsa.
16	**B**	Alinea keempat memuat tujuan negara, salah satunya “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
17	**C**	Alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
18	**A**	Pembukaan memuat Pancasila dan tujuan negara; MPR bersepakat tidak mengubahnya karena mengubah Pembukaan berarti membubarkan negara.
19	**B**	Konstituante hasil Pemilu 1955 tidak berhasil menyusun UUD baru pengganti UUDS 1950, sehingga Presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959.
20	**B**	Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 hasil amendemen: presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
21	**D**	UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis tertinggi, sehingga menjadi dasar dan tolok ukur bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.
22	**C**	Pasal 28E ayat (3): setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
23	**A**	Pasal 29 ayat (2) menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
24	**C**	Pada masa damai, bela negara diwujudkan melalui prestasi, disiplin, dan cinta tanah air, misalnya belajar sungguh-sungguh dan mencintai produk dalam negeri.
25	**D**	Pemilihan presiden secara langsung (Pasal 6A) memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2).
26	**D**	Debat dan kuis tentang isi UUD melatih murid memahami dan mengkaji ketentuan konstitusi serta penerapannya dalam kehidupan nyata.
27	**C**	Sikap konstitusional berarti menyalurkan aspirasi melalui jalur yang sah dan damai, misalnya forum diskusi dan wakil rakyat.
28	**A**	Sesuai UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7: UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.
29	**C**	Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
30	**B**	Pasal 24A ayat (1): Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
31	**C**	Pasal 22 UUD NRI 1945: Perppu ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya; jika tidak, Perppu dicabut.
32	**B**	Pasal 20 ayat (5): RUU yang telah disetujui bersama tetapi tidak disahkan Presiden dalam 30 hari sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
33	**B**	Peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/wali kota.

No.	Kunci	Pembahasan Singkat
34	**C**	Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan, misalnya melalui konsultasi publik atau rapat dengar pendapat.
35	**B**	Kepatuhan hukum seharusnya lahir dari kesadaran akan tujuan aturan, yaitu keselamatan, bukan karena takut pada petugas.
36	**A**	Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
37	**D**	Pelanggaran peraturan berdampak luas: sungai tercemar, saluran tersumbat, dan banjir yang merugikan masyarakat banyak.
38	**B**	Tata tertib yang baik disusun secara partisipatif, rumusannya jelas, sanksinya mendidik, dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
39	**D**	Usulan peraturan sebaiknya didasarkan kajian masalah dan disampaikan secara tertulis melalui saluran resmi seperti DPRD atau musyawarah perencanaan.
40	**C**	Program yang efektif memadukan edukasi (sosialisasi bersama polisi) dengan dukungan orang tua agar murid sadar dan patuh pada aturan lalu lintas.

B. KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK URAIAN

Soal Nomor 41 *(C5 – Tantangan penerapan Pancasila)*

Alternatif jawaban:

- Sikap warga tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, terutama sila pertama (menghormati kebebasan beribadah pemeluk agama lain), sila kedua (memperlakukan sesama secara adil dan beradab), dan sila ketiga (menjaga persatuan dalam keberagaman).
- Sikap itu juga bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin kemerdekaan beribadah.
- Solusi 1: Mengadakan dialog antarumat beragama yang difasilitasi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat (misalnya FKUB).
- Solusi 2: Sosialisasi tentang toleransi dan aturan perizinan agar warga memahami bahwa pembangunan telah sesuai ketentuan.

Skor	Kriteria
4	Evaluasi tepat dengan mengaitkan minimal dua sila/dasar hukum dan dua solusi yang relevan
3	Evaluasi tepat dengan satu sila dan dua solusi, atau dua sila dan satu solusi
2	Evaluasi tepat tanpa solusi yang relevan
1	Jawaban kurang tepat

Soal Nomor 42 *(C4 – Isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945)*

Alternatif jawaban:

- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia → penjagaan wilayah perbatasan oleh TNI, penanganan bencana oleh BNPB.
- Memajukan kesejahteraan umum → bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, program jaminan kesehatan (BPJS).
- Mencerdaskan kehidupan bangsa → program wajib belajar, Kartu Indonesia Pintar, pembangunan sekolah.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia → pengiriman Pasukan Garuda dalam misi perdamaian PBB, keaktifan di ASEAN.
- Contoh lain dapat diterima selama sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

Skor	Kriteria
4	Keempat tujuan benar dan masing-masing disertai contoh yang tepat
3	Keempat tujuan benar, tetapi satu atau dua contoh kurang tepat
2	Hanya dua atau tiga tujuan beserta contohnya yang benar
1	Hanya satu tujuan yang benar

Soal Nomor 43 *(C6 – Penerapan pasal bela negara)*

Alternatif jawaban:

- Aksi 1: Belajar tekun dan berprestasi dalam lomba sains/olahraga. Tujuan: mengharumkan nama bangsa dan meningkatkan kualitas SDM.
- Aksi 2: Membuat konten positif dan melawan hoaks di media sosial. Tujuan: menjaga persatuan dan ketahanan informasi bangsa.
- Aksi 3: Aktif dalam siskamling/kerja bakti dan kegiatan pramuka. Tujuan: menjaga keamanan, ketertiban, dan kepedulian lingkungan.
- Aksi lain dapat diterima (misalnya mencintai produk dalam negeri, disiplin mengikuti upacara) selama relevan dan disertai tujuan.

Skor	Kriteria
4	Tiga aksi relevan, konkret, dan masing-masing disertai tujuan yang tepat
3	Tiga aksi relevan, tetapi tujuan kurang lengkap
2	Hanya dua aksi yang relevan
1	Hanya satu aksi atau kurang relevan

Soal Nomor 44 *(C5 – Hierarki dan pengujian peraturan)*

Alternatif jawaban:

- Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, kedudukan peraturan daerah kabupaten berada di bawah undang-undang, sehingga isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (asas *lex superior derogat legi inferiori*).
- Karena bertentangan, peraturan daerah tersebut tidak sah secara materiil dan dapat dibatalkan.
- Langkah hukum: para pedagang dapat mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung, karena MA berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- Langkah lain: menyampaikan keberatan kepada DPRD dan bupati agar peraturan tersebut direvisi.

Skor	Kriteria
4	Evaluasi berdasarkan hierarki tepat dan langkah hukum (uji materi ke MA) dijelaskan dengan benar
3	Evaluasi tepat, tetapi lembaga pengujian kurang tepat atau kurang jelas
2	Hanya evaluasi atau hanya langkah hukum yang tepat
1	Jawaban kurang tepat

Soal Nomor 45 *(C6 – Merancang peraturan sekolah)*

Alternatif jawaban:

- (a) Tujuan: menciptakan suasana belajar yang tertib dan fokus serta melatih penggunaan ponsel secara bijak.
- (b) Ketentuan pokok: 1) ponsel dinonaktifkan atau disimpan di loker selama pembelajaran; 2) ponsel boleh digunakan untuk pembelajaran atas izin guru; 3) dilarang merekam atau menyebarkan konten yang merugikan orang lain; 4) ponsel boleh digunakan saat istirahat untuk menghubungi orang tua.
- (c) Sanksi mendidik: teguran, ponsel dititipkan kepada wali kelas hingga pulang, membuat tulisan refleksi tentang etika digital, dan pemanggilan orang tua bila berulang.
- (d) Cara penyusunan: survei pendapat murid, musyawarah perwakilan kelas/OSIS dengan guru dan orang tua (komite), lalu disahkan kepala sekolah dan disosialisasikan.
- Jawaban lain dapat diterima selama logis, partisipatif, dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Skor	Kriteria
4	Keempat komponen lengkap, logis, sanksi mendidik, dan penyusunan partisipatif
3	Keempat komponen ada, tetapi salah satunya kurang tepat
2	Hanya dua atau tiga komponen yang dirumuskan
1	Hanya satu komponen atau tidak relevan

C. PEDOMAN PENSKORAN

Bentuk Soal	Jumlah Soal	Skor per Soal	Skor Maksimal
Pilihan Ganda	40	1	40
Uraian	5	0–4	20
Jumlah	**45**		**60**

Nilai Akhir = (Skor Perolehan ÷ 60) × 100

Mengetahui,
Kepala Sekolah

……

NIP. ……

……, …… 2026
Guru Mata Pelajaran

……

NIP. ……